

EDISI REVISI

Teori dan Praktik HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA-AMENDEMENTEN

Dr. Ali Abdullah M., S.H., M.M., M.H., M.Kn.

		PERPUSTAKAAN	
No. INV.			
Th. Angg	Cat :		
PASAP.	TGL.		



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR CETAKAN KETIGA	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Sejarah Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara	1
1. Periode Berlakunya UUD 1945 (1945-1949)	1
2. Periode Berlakunya Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)	2
3. Periode UUDS (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)	2
4. Periode 1959-1986	2
B. Tujuan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara	5
C. Dasar-dasar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara	10
D. Asas-asas Peradilan Tata Usaha Negara	14
E. Perbedaan Hukum Acara Peradilan TUN dengan Hukum Acara Perdata	20
BAB 2 PERIHAL SUBJEK DAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA	23
A. Subjek Sengketa Tata Usaha Negara	23
B. Objek Sengketa Tata Usaha Negara	39
1. Objek Sengketa yang Bersifat Positif	39
2. Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang Bersifat Fiktif Negatif	44
3. Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang Bersifat Fiktif Positif	46
4. Tidak Termasuk Objek Sengketa Tata Usaha Negara	54

BAB 3	PERIHAL SURAT KUASA	59
A.	Ketentuan yang Mengatur Surat Kuasa Khusus	59
B.	Penjelasan Mengenai Unsur-unsur Surat Kuasa	62
c.	Surat Kuasa dengan Hak Substitusi dan Hak Retensi	64
BAB 4	PERIHAL KEWENANGAN MENGADILI PERADILAN TATA USAHA NEGARA	67
A.	Kewenangan Absolut	67
B.	Kewenangan Relatif	71
BAB 5	PERIHAL CARA PENYELESAIAN SENGKETA PERADILAN TATA USAHA NEGARA	75
A.	Gugatan Diajukan Secara Langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara	75
B.	Gugatan Diajukan Secara Tidak Langsung dengan Melalui Upaya Administratif Terlebih Dahulu	77
BAB 6	PERIHAL SENGKETA PERADILAN TATA USAHA NEGARA	85
A.	Gugatan Tata Usaha Negara Harus Tertulis	85
B.	Pendaftaran Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara	88
C.	Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara	94
D.	Alasan-alasan Mengajukan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara	98
E.	Perubahan Alasan Gugatan	102
F.	Pencabutan Gugatan	102
BAB 7	PERIHAL JENIS ACARA PEMERIKSAAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA	105
A.	<i>Dismissal Process</i> (Rapat Permusyawaratan)	105
B.	Acara Pemeriksaan Singkat	109
C.	Acara pemeriksaan Persiapan	111
D.	Acara Pemeriksaan Cepat	114
BAB 8	PERIHAL ACARA PEMERIKSAAN BIASA	117
A.	Penunjukan Majelis Hakim	117
B.	Panggilan Para Pihak	118
C.	KetidakHadiran Para Pihak	119

D. Perdamaian dan Jawaban Tergugat	122
E. Hukum Acara Peradilan TUN Tidak Mengenal Rekonvensi	123
F. Eksepsi	124
G. Pemeriksaan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara	125
H. Jawab Menjawab dalam Pokok Sengketa	131
I. Perihal Intervensi	132
BAB 9 PERIHAL ACARA PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA	139
A. Surat atau Tulisan	141
B. Keterangan Ahli	143
C. Keterangan Saksi	143
D. Pengakuan Para Pihak	145
E. Pengetahuan Hakim	146
BAB 10 PERIHAL PUTUSAN	147
A. Kemandirian Hakim	147
B. Pengambilan Putusan oleh Hakim	148
C. Pembacaan Isi Putusan dan Amar Putusan	156
D. Isi Putusan Hakim	157
BAB 11 PERIHAL UPAYA HUKUM	161
A. Upaya Hukum Biasa	161
1. Banding	161
2. Kasasi	165
B. Upaya Hukum Luar Biasa	173
BAB 12 PERIHAL PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	179
A. Pengertian Eksekusi	179
B. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi	180
1. Eksekusi Otomatis	181
2. Eksekusi Hierarkis	181
3. Eksekusi Daya Paksa	182
C. Eksekusi Terhadap Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang Telah Dinyatakan Batal	183

1. Pencabutan dan/atau Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang Baru	183
2. Ganti Rugi	184
3. Rehabilitasi	185
4. Kompensasi	186
REFERENSI	191
LAMPIRAN	195
I Contoh Surat Keputusan tentang Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang Bersifat Positif	196
II.1 Contoh Surat Kuasa Penggugat Positif	198
II.2 Contoh Surat Kuasa sebagai Penggugat Bersifat Fiktif Negatif	200
II.3 Contoh Surat Kuasa Substitusi	202
II.4 Contoh Surat Kuasa sebagai Tergugat	203
II.5 Contoh Surat Kuasa sebagai Pemohon Intervensi dan Tergugat II Intervensi	205
II.6 Contoh Surat Kuasa sebagai Pembanding	207
II.7 Contoh Surat Kuasa Terbanding	209
II.8 Contoh Surat sebagai Pemohon Kasasi	211
II.9 Contoh Surat Kuasa sebagai Termohon Kasasi	213
III Contoh Surat Gugatan Tata Usaha Negara Positif	215
IV Contoh Surat Jawaban Tergugat	228
V.1 Contoh Surat Permohonan Intervensi	236
V.2 Contoh Penetapan Intervensi Masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi	239
VI Contoh Daftar Bukti	242
VII Contoh Anatomi Putusan Menurut Ketentuan Pasal 109 UU No. 5 Tahun 1986	244
VIII.1 Contoh Memori Banding	261
VIII.2 Contoh Kontra Memori Banding	266
IX Contoh Memori Kasasi	269
X Contoh Permohonan Peninjauan Kembali	274
XI.1 Contoh Surat Kuasa untuk Membayar	279
XI.2 Contoh Resume Gugatan	280
XI.3 Form Penetapan Lolos Dismissal	282
XI.4 Form Penetapan Acara Cepat	283

XI.5	Form Penetapan Penentuan Hari Pemeriksaan	284
XI.6	Pemeriksaan Persiapan: Form B	286
XI.7	Form Penetapan Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan	288
XI.8	Pemeriksaan Persiapan: Form B	290
XI.9	Pemeriksaan Persiapan: Form A	291
XI.10	Persidangan: Form A	292
XI.11	Persidangan: Form A	293
XI.12	Persidangan: Form B	294
XI.13	Persidangan: Form B	295
XI.14	Contoh Akta Permohonan Banding	296
XI.15	Contoh Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding	297
XI.16	Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding	298
XI.17	Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding	299
XI.18	Contoh Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara	300
XI.19	Contoh Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara	301
XI.20	Contoh Surat Pemberitahuan Putusan Banding	302
XI.21	Contoh Surat Pemberitahuan Putusan Banding	304
XI.22	Contoh Akta Permohonan Kasasi	306
XI.23	Contoh Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi	307
XI.24	Contoh Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi	308
XI.25	Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi	309
XI.26	Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi	310
XI.27	Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	311
XI.28	Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	312
XI.29	Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Putusan Mahkamah Agung RI	313
XI.30	Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Putusan Mahkamah Agung RI	315
XI.31	Contoh Penetapan	317
XI.32	Contoh Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan	318

XI.33	Contoh Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan	319
XI.34	Contoh Akta Permohonan Peninjauan Kembali	320
XI.35	Contoh Akta Permohonan Peninjauan Kembali	321
XI.36	Contoh Berita Acara Sumpah	322
XI.37	Contoh Berita Acara Sumpah	323
XI.38	Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali	324
XI.39	Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali	325
XI.40	Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali	326
XI.41	Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali	327
XI.42	Contoh Surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali	328
XI.43	Contoh Surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali	330
XI.44	Contoh Pengumuman	332
XII	Contoh Penetapan Mahkamah Agung	333
XIII.1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986	335
XIII.2	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004	414
XIII.3	Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009	440
XIII.4	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991	466
XIII.5	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985	475
XIII.6	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004	511
XIII.7	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009	522
XIII.8	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009	539
TENTANG PENULIS		567